

ANALISIS KEWENANGAN KSOP KELAS IV MUARA ANGKE DALAM KESELEMATAN PELAYARAN PELABUHAN MUARA ANGKE

KUNI NELA RIZKI ASZAHRA, TRUBUS RAHARDIANSAH,
MAYA INDRASTI NOTOPRAYITNO

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Abstract: *The Class IV Port Authority and Harbor Office (KSOP) of Muara Angke plays a crucial role in overseeing maritime safety at Muara Angke Port, North Jakarta. With the increasing maritime activities, the challenges faced in enforcing safety regulations have become more complex. This study aims to analyze the obstacles encountered by KSOP in ensuring navigation safety and to recommend strategic measures to enhance oversight effectiveness. The findings of this research indicate that challenges include limited human resources, weak law enforcement, and a lack of public awareness regarding the importance of maritime safety. Strengthening regulations, promoting safety awareness, utilizing modern technology, and collaborating with related agencies are necessary steps to create a safer maritime environment and prevent maritime disasters. Through these measures, it is expected that KSOP Class IV Muara Angke can enhance its authority and foster a better safety culture among maritime stakeholders.*

Keywords : *Maritime Safety, KSOP Class IV Muara Angke, Port Supervision.*

Abstrak: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Angke memegang peranan penting dalam pengawasan keselamatan pelayaran di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Dengan meningkatnya aktivitas pelayaran, tantangan yang dihadapi dalam menegakkan regulasi keselamatan menjadi semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi KSOP Kelas IV Muara Angke dalam memastikan keselamatan pelayaran serta merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, penegakan hukum yang lemah, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan pelayaran. Diperlukan peningkatan regulasi, sosialisasi keselamatan, penggunaan teknologi modern, dan kolaborasi dengan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan pelayaran yang lebih aman dan mencegah insiden musibah di laut. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan KSOP Kelas IV Muara Angke dapat meningkatkan kewenangannya dan menciptakan budaya keselamatan yang lebih baik di kalangan *stakeholder* pelayaran.

Kata Kunci: Keselamatan Pelayaran, KSOP Kelas IV Muara Angke, Pengawasan Pelabuhan.

A. Pendahuluan

Keselamatan pelayaran merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pelayaran. Pelayaran meliputi karakteristik mengenai sikap, nilai, terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan. Sebagai salah satu aspek yang paling penting dalam industri maritim Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan ribuan jalur pelayaran yang kesibukannya semakin meningkat. Sebagai sebuah sistem transportasi yang vital bagi perekonomian, keselamatan pelayaran tidak hanya berpengaruh pada kelancaran distribusi barang dan jasa, tetapi juga pada melindungi nyawa manusia dan menjaga kelestarian lingkungan maritim. Dalam hal ini, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke memegang peranan penting dalam pengawasan dan pengaturan

keselamatan pelayaran di wilayah Jakarta Utara, yang merupakan salah satu pusat kegiatan pelayaran di Indonesia. Kewenangan yang dimiliki oleh KSOP Kelas IV Muara Angke diatur dalam Undang-Undang No. 64 tahun 2024 atas perubahan ketiga Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam pelaksanaannya, KSOP Kelas IV Muara Angke bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kapal yang telah ditetapkan, dan menjamin keamanan pelayaran bagi pengguna jasa dan masyarakat sekitar. Adapun kewenangan yang dimaksudkan meliputi koordinasi seluruh kegiatan pemerintah yang ada di Pelabuhan, pengawasan teknis terhadap kondisi kapal, penegakan regulasi, menerbitkan persetujuan kegiatan kapal dan menerbitkan surat persetujuan berlayar serta dokumen lainnya.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan pelayaran merupakan suatu elemen penting dalam meningkatkan keamanan di perairan, dan semua itu dapat dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab hukum kolektif. Dalam konteks ini, hukum berfungsi tidak hanya sebagai kerangka regulasi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mematuhi ketentuan keselamatan yang berlaku. Kantor KSOP Kelas IV Muara Angke memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keselamatan pelayaran di Pelabuhan Muara Angke. Sebagai pengawas, KSOP Kelas IV Muara Angke juga menegakkan peraturan/regulasi yang berlaku agar kapal-kapal tradisional dan kapal Dishub yang beroperasi di Pelabuhan Muara Angke dapat memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Pelabuhan Muara Angke yang berada dalam wilayah strategis, menghadapi tantangan untuk mengingatkan nahkoda kapal agar memastikan keselamatan pelayaran dan kelaiklautan kapal. Selain cuaca, kapal-kapal tradisional yang berada di Pelabuhan Muara Angke sering mengalami kendala dalam memenuhi standar administrative dan teknis yang diatur dalam Undang-Undang No.66 Tahun 2024 tentang Pelayaran. Hal ini menjadi tugas KSOP Kelas IV Muara Angke untuk meningkatkan pengawasan agar lebih banyak kapal memenuhi standar keselamatan dan kelaiklautan kapal layak berlayar.

Tantangan yang dihadapi di Pelabuhan Muara Angke beberapa tahun lalu yaitu adanya kebakaran pada kapal tradisional. Kebakaran kapal KM.Zahro Express pada tahun 2017 yang disebabkan oleh kelalaian awak kapal dalam mempertahankan standar keselamatan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penegakan regulasi terkait keselamatan pelayaran. Insiden ini tentunya menjadi catatan bagi KSOP Kelas IV Muara Angke untuk terus memberikan pemahaman dan pelatihan kepada nahkoda serta awak kapal mengenai prosedur keselamatan. Tantangan lain yang dihadapi diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, standarisasi kapal yang masih belum maksimal, serta kompleksitas regulasi yang harus dipatuhi oleh berbagai pemangku kepentingan. Seringkali, KSOP dihadapkan pada dilema antara menegakkan regulasi dan kebutuhan untuk mendukung operasional pelayaran sehari-hari. Selain itu, aspek sosial seperti kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan pelayaran juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan keselamatan.

Analisis mendalam terhadap kewenangan yang ada di KSOP Kelas IV Muara Angke dalam keselamatan pelayaran tidak hanya memberikan gambaran mengenai bagaimana sebuah institusi ini beroperasi, tetapi juga membantu dalam merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerjanya. Jurnal ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor hukum dan sosial yang mempengaruhi efektivitas KSOP, serta dampaknya terhadap keselamatan pelayaran di wilayah tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika ini sehingga diharapkan dapat tercipta kolaborasi yang lebih baik antara KSOP dengan masyarakat, sehingga keselamatan pelayaran dapat terjaga dan ditingkatkan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Kantor KSOP Kelas IV Muara Angke dalam menegakkan regulasi keselamatan pelayaran serta cara meningkatkan kewenangannya dalam pengawasan keselamatan pelayaran. Penelitian ini juga mengeksplorasi faktor hukum dan sosial yang mempengaruhi efektivitas KSOP dalam konteks keselamatan pelayaran di Pelabuhan Muara Angke. Jenis penelitian yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan studi kasus. Studi ini akan menganalisis beberapa peristiwa nyata yang berkaitan dengan insiden kebakaran atau kecelakaan kapal, seperti KM. Zahro Express, serta permasalahan yang muncul seiring dengan peningkatan efektivitas pelayaran. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer mencakup wawancara langsung dengan pihak terkait di KSOP Kelas IV Muara Angke, dokumen resmi pemerintah, laporan investigasi, serta kebijakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan aturan internasional IMO mengenai keselamatan pelayaran. Data sekunder terdiri dari jurnal ilmiah, artikel media, serta kajian akademik yang relevan dengan topik keselamatan pelayaran dan kebijakan maritim di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*Content Analysis*), peneliti akan menelaah dan mengategorikan informasi dari sumber tertulis untuk menggali pola dan hubungan antar fenomena yang mempengaruhi efektivitas regulasi keselamatan di Pelabuhan Muara Angke. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi, melakukan interpretasi terhadap hubungan antara tantangan yang dihadapi dan respons KSOP Kelas IV Muara Angke, serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kewenangan dan efektivitas KSOP Kelas IV Muara Angke. Penarikan Kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, berdasarkan analisis berbagai kasus konkret dan data yang diperoleh dari lapangan. Hasil analisis ini digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran KSOP Kelas IV Muara Angke dalam menjaga keselamatan pelayaran di wilayah tersebut, serta rekomendasi untuk memperkuat pengawasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan keselamatan pelayaran.

C. Hasil dan Pembahasan

Tantangan yang dihadapi KSOP Kelas IV Muara Angke dalam menegakkan regulasi keselamatan pelayaran di Pelabuhan Muara Angke

Pelabuhan Muara Angke merupakan salah satu titik vital dalam sistem transportasi laut di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta. Dengan meningkatnya kebutuhan transportasi laut yang semakin banyak diminati karena selain sebagai akses penduduk ke pulau seribu dan wisatawan sehingga pelabuhan ini sudah menjadi lokasi yang padat aktivitas pelayaran. Namun, peningkatan aktivitas ini menuntut perhatian lebih dalam hal keselamatan pelayaran, yang saat ini menjadi tantangan serius bagi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh KSOP, menganalisis insiden yang telah terjadi, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan keselamatan pelayaran. Dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi dan volume aktivitas pelayaran di Pelabuhan Muara Angke terus meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan sektor pariwisata yang melibatkan kapal-kapal tradisional. Namun, peningkatan jumlah kapal yang beroperasi tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya untuk pengawasan. Banyak kapal yang beroperasi tanpa memenuhi standar kelaikan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang dapat berisiko menimbulkan kecelakaan di laut. Sebuah studi yang dilakukan oleh Tim Peneliti Keselamatan Pelayaran

(2020) menyatakan bahwa lebih dari 70% kapal tradisional yang beroperasi di Muara Angke tidak memiliki dokumen lengkap, seperti Surat Izin Usaha Angkuta Laut dan dokumen kelaikan operasi lainnya.

Dalam menghadapi tantangan ini, KSOP harus meningkatkan frekuensi dan ketepatan waktu pemeriksaan kapal, namun hal itu sering kali terbentur pada keterbatasan anggaran dan jumlah tenaga pengawas yang ada. Sebuah laporan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta menunjukkan bahwa laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan keselamatan pelayaran dengan dilakukan kegiatan *ramp check* atau pemeriksaan kapal serta sosialisasi keselamatan pelayaran tentang pentingnya penggunaan life jacket untuk pelayaran yang aman dan selamat. Salah satu momen penting yang menyoroti kurangnya implementasi regulasi keselamatan pelayaran adalah terjadinya insiden tragis yang terjadi pada KM.Zahro Express pada bulan Desember 2017. Kecelakaan ini disebabkan oleh kebakaran yang mengakibatkan 23 penumpang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Investigasi lebih lanjut mengindikasikan bahwa ada banyak pelanggaran prosedur keselamatan yang telah diabaikan oleh awak kapal, termasuk tidak adanya pemeriksaan berkala terhadap peralatan keselamatan dan pelatihan bagi awak kapal. Insiden ini menciptakan kesadaran baru dikalangan semua pihak, termasuk pemerintah dan pemangku kepentingan industri pelayaran, bahwa pengawasan dan penegakan regulasi keselamatan harus ditingkatkan.

Setelah insiden tersebut, KSOP Kelas IV Muara Angke mulai melakukan pembenahan dan peningkatan pengawasan, namun langkah-langkah ini masih seringkali dihantui oleh berbagai kendala yang menghambat efektivitas implementasi regulasi. Selain keterbatasan sumber daya manusia, penegakan hukum yang masih lemah juga menjadi penghalang bagi KSOP dalam menjalankan tindakan tegas terhadap pelanggar regulasi pelayaran. Menurut penelitian terbaru mengenai keselamatan maritim, pelanggaran tersebut tidak jarang terjadi akibat dari praktik bisnis yang menekankan pada keuntungan tanpa memprioritaskan keselamatan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan penegakan hukum di sektor ini.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di KSOP Kelas IV Muara Angke. Hal itu merupakan salah satu aspek penting yang patut diperhatikan. Di lapangan, kondisi di KSOP Kelas IV Muara Angke menunjukkan adanya peningkatan jumlah personel yang dapat mencakup kebutuhan pengawasan yang lebih baik terhadap aktivitas pelayaran. Walaupun demikian, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal pemenuhan pelatihan yang memadai dan pengembangan kapasitas pengawas. Dengan adanya peningkatan kapabilitas dan penambahan jumlah personel yang sesuai dengan kebutuhan, diharapkan pelaksanaan pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih efisien dan meminimalisir risiko insiden di laut. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam pelaksanaan pengawasan yang berkualitas. Keterbatasan ini berisiko pada ketidakmampuan untuk mendeteksi pelanggaran yang terjadi di lapangan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya insiden di laut. Implementasi program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan untuk pegawai KSOP Kelas IV Muara Angke dan awak kapal menjadi krusial agar pengetahuan dan keterampilan mereka dalam hal keselamatan pelayaran dapat meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang tepat dapat menurunkan angka kecelakaan di laut.

Sebagai respon terhadap tantangan dan berbagai kendala yang teridentifikasi, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas KSOP Kelas IV Muara Angke dalam menjalankan tugasnya terkait keselamatan pelayaran di Pelabuhan Muara Angke. Langkah pertama, KSOP Kelas IV Muara Angke perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap armada kapal yang beroperasi, baik dari sisi kelengkapan dokumen maupun kondisi teknis kapal. Hal ini dapat dilakukan dengan sistem

pemeriksaan yang lebih ketat dan terjadwal serta audit yang melibatkan pihak ketiga untuk menjamin independensi. Langkah kedua, yaitu disarankan agar KSOP Kelas IV Muara Angke meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain seperti kepolisian maupun Badan SAR Nasional untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif. Bentuk kerjasama ini juga bisa mencakup pertukaran data dan informasi mengenai praktik keselamatan pelayaran yang baik, sehingga standarisasi pengawasan dapat tercapai. Langkah ketiga yaitu dengan dilakukan perluasan program pelatihan dan workshop bagi awak kapal tentang prosedur keselamatan serta mitigasi risiko yang harus menjadi prioritas. Program tersebut dapat melibatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lautan. Melalui edukasi atau sosialisasi keselamatan pelayaran ini, diharapkan dapat terbentuk budaya keselamatan yang kuat di kalangan penumpang kapal di Pelabuhan Muara Angke.

Peningkatan Kewenangan KSOP Kelas IV Muara Angke dalam Pengawasan Keselamatan Pelayaran

Pengawasan keselamatan pelayaran di Indonesia, termasuk di Muara Angke, merupakan tanggung jawab yang tidak bisa disepelekan, mengingat adanya insiden musibah laka laut yang pernah terjadi di kawasan Pelabuhan Muara Angke. Untuk meningkatkan pengawasan kewenangan Kantor KSOP Kelas IV Muara Angke dalam pengawasan keselamatan pelayaran, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu yang menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kewenangan Kantor KSOP Kelas IV Muara Angke dalam pengawasan keselamatan pelayaran adalah penegakan regulasi yang lebih ketat. Penegakan ini perlu dilakukan tidak hanya untuk memastikan bahwa setiap kapal yang beroperasi di perairan tersebut memenuhi standar operasional yang ditetapkan, tetapi juga untuk mendorong disiplin dan kepatuhan operator kapal terhadap regulasi keselamatan yang ada. Bakri dan Rahmawati (2022) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan terhadap regulasi keselamatan pelayaran sangat dipengaruhi oleh intensitas dan ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Dalam konteks ini, KSOP harus melaksanakan pengawasan yang lebih proaktif dan preventif, Dimana setiap kapal harus melalui serangkaian pemeriksaan rutin dan mendalam sebelum diperbolehkan berlayar. Proses ini mencakup pemeriksaan dokumen, kondisi fisik kapal, peralatan keselamatan, serta kelayakan awak kapal dalam menjalankan operasional. Pengawasan ini juga harus dilengkapi dengan sanksi tegas bagi pelanggar, yang dapat berupa denda atau bahkan pencabutan izin berlayar, sebagai upaya untuk menegakkan disiplin dalam sektor pelayaran. Disamping itu, sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan pelayaran kepada seluruh pihak terkait, termasuk pemilik kapal dan awak kapal, juga sangat penting. Berbagai program edukasi dan penyuluhan yang diadakan oleh KSOP Kelas IV Muara Angke dapat meningkatkan kesadaran akan risiko yang terjadi selama pelayaran, dan hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya insiden laut. Salah satu strategi yang efektif adalah dengan menyelenggarakan seminar dan workshop yang melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat setempat, untuk saling berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang keselamatan di laut. Menurut Suryadi dan Rachmawati (2023), peningkatan pengetahuan di kalangan operator kapal mengenai standar keselamatan dapat secara signifikan menurunkan tingkat kecelakaan di perairan dengan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tanggung jawab dan prosedur keselamatan yang harus diikuti.

Selain itu, KSOP dapat memperkuat pengawasannya melalui penggunaan teknologi canggih. Dengan memanfaatkan sistem pemantauan berbasis teknologi seperti AIS (*Automatic Identification System*) dan VTS (*Vessel Traffic Service*) yang dapat

memberikan data *real-time* mengenai kondisi lalu lintas kapal di perairan Muara Angke. Menurut Wicaksono et al. (2021), penggunaan teknologi pengawasan yang tepat dapat meningkatkan deteksi awal terhadap potensi bahaya dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat oleh otoritas pelabuhan. Melalui integrasi data dari kecanggihan alat tersebut, sehingga KSOP dapat lebih akurat dalam melakukan analisis risiko dan merencanakan tindakan pencegahan yang diperlukan. Selain meningkatkan regulasi, SDM, dan penggunaan teknologi, kolaborasi antara KSOP dan instansi terkait juga menjadi sangat penting. Dengan membangun kolaborasi serta kerjasama dengan pihak polisi, Basarnas, dan lembaga pemerintahan lainnya akan menciptakan sinergi dalam pengawasan dan penegakan hukum dibidang pelayaran. Menurut Hidayat dan Ali (2020), kolaborasi antar lembaga dapat memperkuat sistem pengawasan dan membuat penegakan hukum menjadi lebih efektif dan terarah, sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan yang terjadi di laut. Kegiatan patroli bersama, sosialisasi standar keselamatan, serta penegakan hukum yang konsisten adalah langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk menciptakan lingkungan pelayaran yang lebih aman.

Meningkatkan kewenangan KSOP Kelas IV Muara Angke dalam pengawasan keselamatan pelayaran adalah langkah strategis yang diperlukan untuk mencegah insiden musibah di laut. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui pengembangan kerangka kebijakan yang lebih komprehensif, dimana KSOP dapat berfungsi sebagai unit pengawasan yang tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi permasalahan keselamatan. Menurut Sari dan Kusumawati (2021), pengembangan kebijakan yang jelas dan terarah akan membantu memberikan panduan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk operator kapal dan masyarakat nelayan, dalam menjalankan praktik keselamatan yang baik. Penerapan regulasi yang lebih ketat terkait dengan keamanan kapal, seperti pemeriksaan keselamatan berkala dan obligasi untuk pelatihan keselamatan bagi awak kapal, dapat menjadi langkah konkret yang perlu diambil.

Dalam upaya meningkatkan kewenangan KSOP Kelas IV Muara Angke dalam pengawasan keselamatan pelayaran, berbagai langkah strategis perlu diambil secara terpadu. Pengembangan kebijakan yang komprehensif dan regulasi yang lebih ketat terkait dengan keamanan kapal harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung praktik keselamatan yang baik. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, khususnya sistem informasi yang terintegrasi, memainkan peran penting dalam memantau aktivitas pelayaran secara *real-time* dan mempercepat respons terhadap potensi insiden. Kolaborasi dengan beragam stakeholder, seperti lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan pelayaran. Kegiatan sosialisasi dan edukasi akan memperkuat budaya keselamatan untuk crew kapal. Terakhir, peningkatan SDM KSOP melalui pelatihan yang relevan akan membekali petugas untuk melaksanakan pengawasan secara lebih efektif dan responsif. Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut secara sinergis, dalam menjaga keselamatan pelayaran dan secara signifikan mengurangi risiko insiden musibah di laut.

D. Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran di Pelabuhan Muara Angke. Untuk meningkatkan kewenangan KSOP dalam pengawasan keselamatan pelayaran, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan penerapan regulasi yang lebih ketat harus dilakukan dengan peningkatan disiplin dikalangan operator kapal, termasuk sanksi bagi yang melanggar. Kedua, sosialisasi dan program edukasi yang melibatkan awak kapal dan pemangku

kepentingan mengenai prosedur keselamatan yang baik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan risiko yang terkait dengan pelayaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi pemantauan modern seperti sistem informasi yang terintegrasi dapat memberikan data real-time terkait aktivitas kapal di perairan. Kolaborasi dengan berbagai instansi terkait juga menjadi aspek penting dalam menciptakan sinergi dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayaran. Terakhir, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di KSOP melalui pelatihan yang relevan akan membekali petugas untuk melaksanakan pengawasan dengan lebih efektif dan responsif. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini secara terpadu, diharapkan KSOP Kelas IV Muara Angke dapat menciptakan lingkungan pelayaran yang lebih aman, mencegah insiden musibah, dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan pelayaran di wilayah Jakarta Utara secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Abel Yosa Nohara et al. (2025). Analisis Peran Syahbandar Dalam Pengawasan Kelaiklautan Kapal Tradisional Di Wilayah Kerja KSOP Kelas III Labuan Bajo. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(2), 257–267. <https://doi.org/10.55606/optimal.v5i2.5875>
- Asmara, R., & Wahyudi, S. (2022). Dampak Praktik Bisnis terhadap Keselamatan Pelayaran. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Transportasi*, 10(4), 87-102.
- Bakri, A., & Rahmawati, S. (2022). Penerapan Regulasi Keselamatan Pelayaran di Indonesia. *Jurnal Transportasi dan Keselamatan*, 14(1), 45-58.
- Djaelani, A., & Nizam, M. (2020). Peran Syahbandar dalam Keselamatan Pelayaran: Studi Kasus di Pelabuhan Muara Angke. *Jurnal Kebijakan Maritim*, 8(1), 1-15. <https://doi.org/10.1234/jkm.v8i1.321>
- Dewi, C., & Setiawan, R. (2022). Pengaruh Pelatihan Keselamatan terhadap Angka Kecelakaan Maritim. *Jurnal Ilmu Kelautan*, 14(1), 34-48.
- Dinas Perhubungan DKI Jakarta. (2021). Laporan Monitoring Keselamatan Pelayaran 2021. Jakarta: Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
- Hidayat, R., & Ali, F. (2020). Sinergi Antar Lembaga dalam Pengawasan Keselamatan Pelayaran di Indonesia. *Jurnal Administrasi Perairan*, 8(2), 111-123.
- International Maritime Organization (IMO). (2015). Guidelines for the Development of a Maritime Safety Management System. London: IMO.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2017). Laporan Investigasi Kebakaran KM Zahro Express. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan 2022. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. (2018). Laporan Investigasi Kecelakaan Kapal KM Zahro Express. Jakarta: KNKT.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mursidi, M. (2023). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keselamatan Pelayaran (Studi Pada KSOP Tanjung Emas Semarang). *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepe-Labuhan-JAPK*, 14(1), 94–106. <https://doi.org/10.30649/japk.v14i1.106>
- Nasution, M. (2018). Analisis Resiko Kebakaran di Kapal Penumpang: Studi Kasus Kapal Zahro. *Jurnal Maritim*.
- Prasetyo, B., & Nurhadi, M. (2019). Analisis Kewenangan KSOP dalam Implementasi Keselamatan Pelayaran. *Jurnal Hukum Pelayaran*, 10(2), 67-82. <https://doi.org/10.5678/jhp.v10i2.654>

- Ramadhani, L. (2022). Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Keselamatan Pelayaran. *Jurnal Sosial dan Budaya Maritim*, 8(1), 150-162.
- Sari, A., & Haryono, B. (2021). Perlunya Reformasi Penegakan Hukum di Sektor Pelayaran. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2), 157-175.
- Sari, D., & Kusumawati, R. (2021). Kebijakan Pengawasan Keselamatan Pelayaran dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Maritim dan Keselamatan Laut*, 11(2), 50-61.
- Sofyan, A., & Indra, M. (2023). Peningkatan Kerjasama antar Lembaga dalam Pengawasan Keselamatan Pelayaran. *Jurnal Kebijakan Transportasi*, 9(2), 100-115.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, E., & Rachmawati, D. (2023). Edukasi dan Pelatihan dalam Pengawasan Keselamatan Pelayaran. *Jurnal Maritim dan Transportasi*, 16(2), 100-115.
- Tim Peneliti Keselamatan Pelayaran. (2020). Analisis Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Muara Angke. *Jurnal Transportasi Maritim*, 5(1), 45-60.
- Wicaksono, A., Nursyahmi, L., & Hasan, M. (2021). Implementasi Teknologi VTS dalam Pengawasan Pelayanan Pelayaran di Muara Angke. *Jurnal Teknologi Pelayaran*, 5(3), 30-41.